

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Penelitian

Partai *Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei* (NSDAP) atau biasa disebut Nazi merupakan partai politik ekstrem kanan Jerman yang muncul pada periode 1920an sebagai respon dari kondisi kekacauan Jerman pasca Perang Dunia I. Bermula sebagai partai politik kecil, partai Nazi berkembang hingga menjadi partai mayoritas di Jerman pada tahun 1930an. Pembentukan partai Nazi dimulai pada tahun 1919 dengan nama Partai Buruh, dan diinisiasi oleh Anton Drexler. Ia memulai partai ini dengan kegiatan-kegiatan diskusi seputar tema nasionalisme dan rasisme yang diarahkan pada orang-orang Yahudi. Dari diskusi tersebut, Drexler berfikir untuk membentuk partai politik yang berlandaskan pada visi yang mereka miliki (Kershaw, 2008. 82).

Partai ini kemudian berjalan hingga menuju tampuk kekuasaannya memerintah Jerman bersama dengan Adolf Hitler. Nazi bersama dengan Hitler melakukan percobaan kudeta pada tahun 1923 namun tidak menghasilkan apapun, alhasil setelah percobaan tersebut Nazi menjadi partai politik terlarang dan pemimpinnya Hitler dijebloskan ke dalam penjara. Selama di penjara, Hitler menghabiskan waktunya menulis karya bersejarahnya yakni *Mein Kampf* sebuah buku yang berisi ide-ide dan juga pemikiran yang akan menjadi dasar gerakan Hitler bersama Nazi kelak. Dalam bukunya tersebut, ia memaparkan pemikirannya yang mengacu pada Darwinisme Sosial. Ia juga menuliskan garis besar program politik yang akan dilakukan bersama dengan Partai Nazi, terutama obsesinya pada terbentuknya negara Jerman atas masyarakat ras Arya. Ras ini ia yakini sebagai ras terunggul di dunia, dan mampu membawa kemakmuran bagi Jerman. Setelah keluar dari jeruji besi, Hitler mulai mengumpulkan kekuatan politik yang besar. Hal ini dibuktikan dengan perolehan suara yang didapatkan oleh Nazi pada pemilu 1930 yaitu 18,3% yang membawa mereka menjadi partai kedua dengan pemilih terbanyak setelah Partai Sosial Demokrat. Kenaikan dari suara pendukungnya terus berlanjut hingga Hitler berhasil terpilih menjadi kanselir pada

30 Januari 1933, mencapai puncaknya pada 12 November 1933 Partai Nazi memenangkan suara pada pemilu sebesar 48% suara. (Welch, 1999, hlm. 76).

Partai Nazi semakin memperluas pengaruhnya termasuk paham dan ideologi. Muncul satu paham yang diterapkan oleh Nazi yang disebut dengan Nazisme atau *Nationalsozialismus*. Nazisme merupakan ideologi yang dibentuk oleh Nazi sebagai acuan dasar praktik politiknya, dan tentu saja mengandung unsur kebencian terhadap Yahudi. Selain itu, ideologi ini juga mengandung kebencian terhadap demokrasi liberal dan sistem parlementer sebagai musuh politiknya. Adapun yang menjadi akar dari ideologi ini adalah budaya *Völkisch*, dalam bahasa Inggris *Volk* berarti rakyat atau orang-orang. Istilah ini berasal dari kata *Volkskunder* yang muncul pada akhir abad ke-18 yang merujuk pada studi ilmiah sejarah kolektif bangsa Jerman. Dalam logika nasionalisme *Völkisch*, bangsa Yahudi merupakan musuh utama karena mereka tidak memiliki hubungan terhadap *Völk*. Bangsa ini kerap dikaitkan dengan semua hal yang artifisial, asing, dan berbahaya bagi *Völk*. Kehidupan petani dianggap sebagai simbol nilai dari *Völk*. dibandingkan dengan karakteristik kehidupan kota yang sama sekali tidak *Völkisch*: industrialisme, kapitalisme, sosialisme, pasifisme, feminisme, dan semua budaya rendahan (*asphalt culture*) yang berasal dari bangsa Yahudi (Steiman, 1998, hlm.126).

Narasi antisemitisme ini terus diimplementasikan dalam kebijakan dan juga gerakan politik Nazi. Perang melawan Yahudi atau *der jüdische Krieg* bahkan dijadikan narasi utama propaganda masa itu. Nazi menerjemahkan konsep ideologis fundamental ini menjadi suatu bahan utama propaganda (Herf, 2005, hlm. 1). Prinsip dasar yang menjadi acuan Nazisme adalah ras, namun tidak semua orang Jerman mengaminkan antisemit sebagai pemikiran biologis dan ilmiah. Keruntuhan Republik Weimar membawa Nazi mengambil alih kekuasaan dan berleluasa menyebarkan paham tersebut (Passmore, 2002, hlm. 69.). Berdasarkan rasial antisemitisme yang dianut oleh Nazi berupaya untuk merampas hak politik yang dimiliki orang Yahudi. Stötzler (2008, hlm. 191) menyatakan hal yang membuat antisemitisme politis bukanlah konsep rasial yang diadopsi, melainkan aspek sosial yang terkandung dalam ideologi ini diantaranya,

anti-modernisme, anti-kapitalisme, anti-liberalisme dan lain sebagainya. Antisemitisme pun semakin menjadi dengan menyebarkan faktor nasionalisme pada saat itu.

Upaya penyebaran paham Nazi dengan tujuan mewujudkan cita-citanya diimplementasikan dalam seluruh lini masa kebijakan Nazi. Salah satu bentuk upayanya adalah melakukan Nazifikasi terhadap seluruh kepolisian Jerman. SS (*Schutzstaffel*) merupakan satuan militer Nazi yang mengupayakan aksi nyata tentang propaganda anti Bolshevik. Bersamaan dengan SS, muncul satuan polisi yang bertugas menjaga rezim dari seluruh ancaman politik maupun ancaman lainnya, terkhusus yang timbul dari kaum Yahudi. *Geheimstaatspolizei* atau kerap dikenal Gestapo merupakan polisi politik atau polisi rahasia Nazi yang kemudian menjadi identik kediktatoran Nazi. Pada mulanya, Gestapo merupakan departemen dari kepolisian dalam negara Prusia yang bertugas mengawasi gerak-gerik lawan politik pemerintah dibawah Kementerian Dalam Negeri. Pembentukan Gestapo diawali oleh Herman Goerring, meskipun dibentuknya Gestapo memiliki tujuan partai dan negara yang jelas, tetapi dianggap oleh Goerring sebagai instrumen untuk peningkatan kekuasaannya sendiri dalam lingkaran partai (Longerich, 2012, hlm. 22).

Tradisi spionase politik melalui intelijen atau polisi politik telah ada di Jerman sejak tahun 1848. Josef (2008, hlm 121) mengatakan bahwa Raja Ludwig I dari Bavaria menyetujui pemantauan lawan politik di aula bir lokal. Bahkan ketika kekaisaran Jerman didirikan pada 1871, negara bagian Prusia yang luas mencakup 60 persen wilayah Jerman memiliki polisi politik atau polisi rahasianya sendiri (*Politische Polizei*). Pada saat itu mereka bahkan memiliki mata-mata utama Bismarck yakni Wilhelm Stieber, yang berperan penting dalam intelijen domestik dan luar negeri Jerman. Kemudian, Departemen intelijen milik Prusia ini berkembang dan menjadi cikal bakal Gestapo pada tahun 1933. Hermann Goering mengembangkan badan intelijen ini bukan hanya untuk kepentingan negara namun sepenuhnya untuk kepentingan partai yang berkuasa dalam rezim tersebut.

Seiring berjalannya waktu, yang disertai dengan konflik internal antar kepentingan para petinggi Nazi, Gestapo menjadi satuan kepolisian rahasia resmi

bersamaan dengan SS dan SD di seluruh wilayah pemerintahan *Third Reich*. Gestapo jatuh ke tangan Heinrich Himmler yang pada saat itu memegang kekuasaan atas satuan militer SS (*Schutzstaffel*). Akibatnya, setelah Himmler memegang Gestapo, hampir semua personel yang menjadi eksekutif Gestapo merupakan anggota SS, termasuk Reinhard Heydrich kepala SD (*Sicherheitsdienst*) yang menjadi eksekutif Gestapo dibawah Himmler. (Longerich, 2012, hlm. 25). Gestapo bergerak menjadi institusi yang meneror Jerman sejak 1933, tugas utamanya menurut undang-undang tahun 1936 adalah “menyelidiki dan menekan semua kecenderungan yang bersifat anti negara” (Gellately, 1988, hlm. 655). Gestapo dibentuk bukan hanya untuk mengambil peran dominan dalam menghancurkan perlawanan dalam bentuk apapun, namun juga berupaya untuk menegakan kebijakan yang ditegakan untuk mengatur perilaku di bidang politik. Gestapo bergerak dalam hal yang berkaitan dengan masalah ras, khususnya orang-orang Yahudi. Sang Fuehrer menganggap bahwa keberadaan Yahudi merupakan suatu ancaman yang pasti bagi pemerintahannya. Maka dari itu Gestapo ditugaskan untuk hadir diantara masyarakat menjadi mata-mata yang mengawasi gerak-gerik masyarakat yang berhubungan dengan orang Yahudi.

Gestapo sebagai lembaga kepolisian rahasia bahkan memiliki hak istimewa yang dilindungi secara legal oleh undang-undang. Dinyatakan bahwa Gestapo berhak untuk memberangus siapapun yang hanya sekedar berbelanja di toko orang milik Yahudi, atau berbincang dengan orang Yahudi karena dianggap telah menimbulkan kecurigaan atas pengkhianatan negara. Diskriminasi terhadap ras non-Arya semakin ditunjukkan dengan dikeluarkannya undang-undang Nuremberg pada 15 September 1935 yang menegaskan bahwa hanya bangsa asli Jerman yang berhak mendapatkan pelayanan sipil dan negara. Hal ini semakin memberikan wewenang dan keleluasaan bagi Gestapo untuk menjalankan tugasnya, khususnya dalam gerakan anti Yahudi dan pengendalian juga pengawasan terhadap kaum Yahudi di seluruh tanah Jerman.

Berbeda dengan pasukan SS yang secara terang-terangan melakukan tugasnya, polisi rahasia Gestapo ini memberikan keresahan yang cepat dan efektif

terhadap masyarakat. Siapapun yang berniat untuk melakukan sikap perlawanan terhadap negara segera mengurungkan niatnya karena merasa Gestapo ada di setiap sudut untuk mengawasi. Loughlin (2011, hlm 54) menyatakan bahwa sebuah artikel tribun di Chicago tahun 1938 mengatakan “*orang-orang menyadari bahwa mereka tidak berdaya, mereka tidak dapat melakukan apapun untuk melawan Gestapo*”. Taktik Gestapo yang mampu membobol rumah, merusak surat, melanggar kerahasiaan bank, dan juga penyamaran untuk mendapatkan informasi begitu menakutkan bagi masyarakat Jerman pada saat itu. Hal ini dikarenakan mereka menyadari bahwa Gestapo merupakan institusi yang kebal akan hukum meski apa yang mereka lakukan terkadang tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Selama masa pemerintahan Third Reich, Gestapo juga bertanggung jawab sebagai kelompok yang turut serta melakukan genosida terhadap kaum Yahudi pada peristiwa yang disebut dengan Holocaust karena Gestapo mengambil peran besar dalam pengangkutan orang Yahudi ke kamp konsentrasi dengan perlakuan yang tidak manusiawi.

Dalam melakukan pengawasan serta penangkapan, Gestapo tentunya membutuhkan lumbung informasi yang tersebar dimana-mana. Maka dari itu, tidak dapat dipungkiri bahwa cara kerja Gestapo dibantu oleh masyarakat Jerman yang turut memberikan informasi mengenai gerak gerik seseorang yang mencurigakan sebagai ancaman negara. Longerich (2012, hlm. 54) menyatakan bahwa efensiensi kerja Gestapo dibatasi oleh tenaga kerjanya pada operasi pengawasan tertentu. Gestapo juga bergantung pada dukungan yang lebih luas dari informan yang tersebar termasuk warga sipil, juga aparat keamanan. Gestapo memanfaatkan masyarakat Jerman untuk memberi informasi mengenai tetangga mereka yang mencurigakan lalu Gestapo akan menentukan siapa yang akan ditangkap dan dideportasi ke kamp-kamp konsentrasi. Atas dasar hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kehadiran Gestapo mampu memanipulasi atau mempengaruhi psikologi sosial dari masyarakat Jerman pada saat itu melalui rasa cemas dan gelisah yang terus menerus, kondisi masyarakat tersebut disebut dengan masyarakat panoptikon. Gestapo sebagai polisi rahasia berhasil memberikan terror terhadap kehidupan masyarakat Jerman yang sangat

mengerikan. Maka dari itu, pasca Perang Dunia II, Gestapo menjadi salah satu organisasi yang diadili atas perannya dalam pelaksanaan Holocaust.

Meskipun memiliki tujuan yang sama dengan jajaran aparat keamanan dan militer Nazi lainnya seperti *SS* dan *SD*, Gestapo memiliki cara tersendiri dalam melakukan tugasnya sebagai polisi rahasia. Kehadirannya ditengah-tengah masyarakat sebagai perangkat rezim tidak hanya memberikan kecaman secara langsung, namun juga melalui pengaruh dari berbagai propaganda yang mampu menempatkan masyarakat menjadi berpihak pada rezim. Artikel New York Times pada tanggal 17 Februari 1936 bahkan mengatakan bahwa Gestapo merupakan polisi rahasia negara yang serba bisa, tidak menampakan diri di media cetak umum namun selalu ada di benak hampir semua masyarakat Jerman, strata tinggi atau rendah, di kantor atau di rumah, dan hal yang luar biasa adalah kenyataan bahwa Gestapo ditakuti semua orang. (Loughlin, 2012, hlm. 56).

Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti bermaksud untuk menulis sebuah karya ilmiah, yang membahas lembaga polisi rahasia Nazi yakni *Geheime Staatspolizei* (Gestapo). Bagaimana Gestapo menjalankan tugasnya selama masa pemerintahan, bagaimana kontribusinya dalam penyebaran antisemitisme, dan taktik yang dilakukannya dengan kegiatan politik, spionase dan propaganda untuk dapat mendapatkan pengaruh sosial yang berdampak besar. Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya terkait Gestapo, telah memaparkan mengenai kinerja Gestapo dengan pasukan kepolisian juga paramilter Nazi lainnya. Para peneliti sebelumnya memaparkan bahwa kinerja pasukan Gestapo hampir sama dengan pasukan *SS* dan *SA* dalam menegakan ketertiban sosial dengan cara-cara yang mengerikan. Namun yang membedakan adalah gerak-gerik Gestapo yang selalu dilakukan dengan cara rahasia, sehingga membuat keberadaan Gestapo misterius dan didalam bayang-bayang pasukan lainnya. Penelitian lainnya juga menjelaskan bagaimana kinerja Gestapo dapat menangkap musuh negara hingga di berbagai lapisan masyarakat mulai dari orang-orang yang terdapat didalam birokrasi negara hingga buruh pabrik yang terindikasi merupakan anti negara.

Peneliti bermaksud untuk menggali lebih dalam dan memunculkan persepsi baru terhadap Gestapo dengan pemikiran modern, yang menempatkan Gestapo

sebagai alat politik yang dibesar-besarkan sehingga mendapatkan pengaruh sosial tersebut. Keberadaan masyarakat yang memberikan informasi dalam jalannya kinerja Gestapo menjadi suatu hal yang menarik untuk dikaji, mengingat keberhasilan rezim Nazi dalam upaya genosida terhadap kaum Yahudi cukup besar dan terdapat kontribusi Gestapo didalamnya. Merujuk pada peristiwa Holocaust yang melakukan pembunuhan mekanis jutaan orang dan terjadi di abad modern ke 20, peneliti merasa tertarik untuk mengkaji salah satu lembaga yang bertanggung jawab dan berperan dalam peristiwa tersebut. Peneliti juga bermaksud melakukan penelitian ini untuk memperdalam penelitian terkait Gestapo dengan mengkaji perjalanannya dari awal pembentukan hingga keruntuhannya bersamaan dengan kekalahan Jerman pada Perang Dunia II. Penelitian ini juga akan mengkaji lebih dalam pada aktivitas spionase dan propaganda yang dilakukan oleh Gestapo selama masa pemerintahan Nazi, dan memperluas citra Gestapo bukan hanya sebagai polisi rasial, namun juga polisi politik pada masa pemerintahan Nazi.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti paparkan, adapun permasalahan pokok yang akan peneliti kaji yaitu: “*Bagaimana Peranan Polisi Rahasia: Geheime Staatspolizei (GESTAPO) dalam pemerintahan Nazi Jerman 1933-1945*”, Untuk memusatkan fokus terhadap permasalahan diatas, peneliti memaparkan rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang terbentuknya Gestapo (1933)?
2. Bagaimana peran Gestapo dalam spionase, politik dan propaganda pada masa sebelum Perang Dunia II (1933-1939)?
3. Bagaimana peran Gestapo dalam spionase dan pembersihan etnis pada masa Perang Dunia II (1939-1945)?
4. Bagaimana dampak peran Gestapo terhadap masyarakat Jerman dan daerah yang dikuasai (1933-1945)?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana peranan polisi rahasia *Geheime Staatpolizei* (Gestapo) pada masa pemerintahan Nazi di Jerman kurun waktu 1933-1945, berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka peneliti memiliki beberapa poin tujuan yang hendak dicapai, yakni sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan proses terbentuknya Gestapo dan awal karir Gestapo sebagai polisi politik Prusia hingga menjadi polisi rahasia negara yang melalui berbagai permasalahan politik. (1933)
2. Menjelaskan kiprah Gestapo dalam melakukan spionase, politik, dan propaganda terhadap oposisi politik Nazi pada masa sebelum Perang Dunia II. (1933-1939)
3. Mendeskripsikan peran Gestapo dalam melakukan spionase terhadap musuh negara dan kontribusinya dalam pembersihan etnis pada masa Perang Dunia II baik didalam Jerman maupun diluar Jerman. (1939-1945)
4. Menjelaskan dampak sosial dari gerakan Gestapo terhadap kehidupan masyarakat Jerman dan juga masyarakat di daerah yang dikuasainya. (1933-1945)

### 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penulisan ini secara umum bertujuan untuk memperoleh gambar mengenai “Peranan Polisi Rahasia Nazi, *Geheime Staatpolizei* (Gestapo) pada masa pemerintahan Nazi Jerman 1933-1945”. Adapun manfaat yang penulis harapkan dari penelitian ini. Terbagi menjadi dua manfaat, yaitu manfaat secara teoritis dan praktis diantaranya:

#### 1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam:

1. Memperkaya penelitian sejarah mengenai Partai Nazi Jerman, yang membahas mengenai lembaga polisi rahasia Nazi yakni *Geheime Staatpolizei* atau disingkat Gestapo.



2. Untuk dijadikan acuan dalam ruang lingkup penelitian yang lebih luas dan mendalam bagi kajian sejarah pemerintahan Nazi Jerman pada masa Perang Dunia II.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam:

1. Penulisan karya ilmiah ini dapat digunakan untuk mahasiswa pendidikan sejarah untuk mengetahui sejarah dari Partai Nazi khususnya mengenai “Peranan Polisi Rahasia *Geheime Staatpolizei* (Gestapo) dalam Pemerintahan Nazi Jerman 1933-1945.
2. Dijadikan referensi untuk memperluas materi pelajaran sejarah peminatan kelas XI SMA yang ada pada standar kompetensi 3.6 yakni menganalisis pengaruh Perang Dunia I dan Perang Dunia II terhadap kehidupan politik global (LBB dan PBB).

#### **1.5 Struktur Organisasi Skripsi**

Sistematika penelitian karya ilmiah skripsi, tesis dan disertasi disesuaikan dengan ramah dan cakupan disiplin bidang ilmu yang ada di Universitas Pendidikan Indonesia. Adapun sistematika skripsi, tesis dan disertasi yang lazim digunakan di Universitas Pendidikan Indonesia terdiri dari beberapa unsur, yaitu:

Bab 1 Pendahuluan, membahas secara terperinci mengenai latar belakang masalah yang diangkat oleh peneliti. Bab ini menjelaskan secara singkat, padat dan jelas mengenai Partai Nazi yang muncul sebagai salah satu respon masyarakat terhadap kekacauan pasca Perang Dunia I di Jerman. Partai Nazi merupakan salah satu partai buruh yang kemudian berkembang menjadi penguasa Jerman. Nazi dipimpin oleh seorang yang menganut antisemitisme radikal yakni Adolf Hitler. Hal tersebut menjadikan antisemitisme sebagai dasar seluruh kebijakan yang dibuat pada masa pemerintahan Nazi Jerman, berbagai upaya dilakukan Hitler untuk mencapai kemurnian Jerman yang dianggap sebagai kunci dari kesejahteraan negara ketika ras yang tersisa ialah ras Arya yang diagungkan - agungkannya. Sebagai salah satu upaya mewujudkan hal tersebut, Hitler bersama jajarannya khususnya Herman Goerring membentuk satuan polisi rahasia atau polisi politik Nazi yakni *Geheime Staatpolizei* (Gestapo) untuk menjaring kaum

Yahudi yang ada di seluruh penjuru Jerman untuk dijebloskan ke kamp-kamp konsentrasi sebelum semuanya dibantai. Untuk memperinci dan membatasi masalah agar tidak melebar, peneliti mencantumkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Pada bagian akhir, peneliti memaparkan struktur organisasi skripsi yang akan menjadi pedoman peneliti dalam melakukan penelitian skripsi.

Bab II Kajian Pustaka, memaparkan teori dan konsep yang peneliti kutip dari buku, internet, jurnal dan buku elektronik (*e-book*) sebagai referensi yang dapat mendukung peneliti mengkaji Peranan Polisi Rahasia Nazi: *Geheime Staatpolizei* (Gestapo) pada masa pemerintahan Nazi Jerman 1933-1945. Teori dan konsep yang dipaparkan pada bab ini akan menunjang sudut pandang peneliti dalam mengkaji judul terkait. Bab ini juga memaparkan mengenai penelitian terdahulu yang relevan dengan pembahasan yang peneliti kaji.

Bab III Metode Penelitian, menguraikan beberapa tahap yang akan dilakukan peneliti dalam menunjang penelitian. Permasalahan yang peneliti ambil adalah Peranan Polisi Rahasia Nazi *Geheime Staatpolizei* dalam pemerintahan Nazi Jerman 1933-1945. Peneliti menerapkan metode penelitian sejarah yang terdiri dari heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Heuristik merupakan tahap awal dengan kegiatan pengumpulan sumber-sumber yang dibutuhkan dan dapat menunjang penelitian skripsi ini. Setelah pengumpulan sumber dilakukan, peneliti melakukan kritik yaitu tahap pengolahan data yang didapatkan dari tahapan heuristik sehingga data yang didapatkan otentik dan reliabel untuk dijadikan sebagai referensi. Setelah kritik, peneliti melakukan tahap interpretasi yakni pemaparan sejarawan terhadap data-data yang telah diperoleh dan melalui tahapan kritik. Selanjutnya, peneliti melakukan proses historiografi, yakni pemaparan penelitian dalam bentuk tulisan yang dikemas secara menarik dan memiliki nilai-nilai didalamnya.

Bab IV, Peranan Polisi Rahasia Nazi: *Geheime Staatpolizei* dalam pemerintahan Nazi Jerman 1933-1945, akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dipaparkan dalam rumusan masalah. Dalam bab ini akan dipaparkan jawaban dari rumusan masalah secara mendalam dan komprehensif. Pembahasan

akan dimulai dengan latar belakang dari proses terbentuknya satuan polisi rahasia Nazi Gestapo, fungsi dan tujuannya dalam menunjang pemerintahan rezim Nazi. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan terkait inti dari permasalahan yakni gerakan Gestapo pada masa pemerintahan Nazi Jerman 1933-1945. Khususnya perannya dalam melaksanakan spionase dan pembersihan etnis pada masa sebelum Perang Dunia II dan pada masa Perang Dunia II. Pada bagian terakhir, peneliti akan memaparkan mengenai dampak gerakan Gestapo terhadap kehidupan masyarakat Jerman dan luar Jerman pada kurun waktu 1933-1945.

Bab V Simpulan dan Rekomendasi, menjelaskan simpulan atas pembahasan yang sudah dikaji oleh peneliti mulai dari menjelaskan mengenai proses pembentukan Gestapo, kesimpulan dari gerakan gestapo pada masa saat Nazi menjalankan roda pemerintahannya dan dilanjutkan mengenai kesimpulan dampak dari gerakan Gestapo terhadap kehidupan masyarakat Jerman. Menyadari bahwa karya tulisan peneliti jauh dari kata sempurna, pada bab ini akan dituliskan pula saran dan rekomendasi dari peneliti yang diajukan kepada setiap pihak untuk mengembangkan hasil kajian yang telah dilakukan oleh peneliti.